SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna pemerataan akses dan mutu pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Nilai Kelulusan adalah rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah nilai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah.
11. Mekanisme dalam jaringan selanjutnya disebut daring adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempergunakan fasilitas internet.
12. Mekanisme luar jaringan selanjutnya disebut luring adalah penerimaan peserta didik baru secara manual tanpa mempergunakan fasilitas internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk PPDB tahun ajaran 2021/2022; dan
b. memberikan pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan dalam PPDB tahun ajaran 2021/2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
b. sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 4

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:
    a. objektif;
    b. transparan; dan
    c. akuntabel.
(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
    a. 7 (tujuh) tahun; atau
    b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
    a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
    b. kesiapan psikis.
(4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Pasal 8

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
    a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
    b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
    c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 huruf a.

Pasal 9

(1) Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 huruf a; dan
b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
    a. zonasi;
    b. afirmasi;
    c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
    d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. jalur zonasi SD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
    b. jalur zonasi SMP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jalur afirmasi SD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
   b. jalur afirmasi SMP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk SD dan SMP sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Jika daya tampung jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dibuka pendaftaran jalur prestasi khusus untuk SMP.

(6) Kuota pendaftaran jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
   a. satuan pendidikan kerja sama;
   b. sekolah Indonesia di luar negeri;
   c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan
      khusus;
   e. sekolah berasrama;
   f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganti apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun atau kepala lingkungan yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

(5) Pemalsuan surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Calon peserta didik hanya dapat memiliki 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 17

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
   a. nilai kelulusan berdasarkan rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir ditambah dengan nilai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan SD/MI; dan
   b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

(1) Pelaksanaan PPDB meliputi:
   a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
   b. pendaftaran;
   c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
   d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
   e. daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
   a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
   b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
   a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
   a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
   b. tanggal pendaftaran;
   c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
   d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
   e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 24

(1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme luring dan SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring.

(2) Pendaftaran PPDB mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(3) Pendaftaran PPDB mekanisme luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan.

(4) Pendaftar PPDB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme daring dapat dibantu oleh operator sekolah.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 25

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
   b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

(3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 27

(1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

(3) Dinas pendidikan dalam hal melaksanakan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menginformasikan sekolah terdekat yang masih kekurangan calon peserta didik.

(4) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

(5) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

(1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
(2) Jika masih terdapat kekurangan jumlah siswa dari daya tampung yang tersedia maka dapat membuka pendaftaran pada tahap dua.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Pasal 30

Perhitungan pembobotan pendaftar sekolah menengah pertama (SMP) dan pemeringkatan pendaftar sekolah dasar (SD) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 31

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
(3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 32

(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 33

(1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 34

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 35

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi:
   a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
   b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
   c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima SMP di daerah setelah:
   a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
   b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
   c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
   d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 37

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

(3) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman ***http://ult.kemdikbud.go.id.***

Pasal 39

(1) Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH., MH.
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DAYA TAMPUNG, ZONASI DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

I. SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
1	UPT SDN 030277 SIDIKALANG	2	Sidikalang	Luring
2	UPT SDN 030279 SIDIKALANG	3	Sidikalang	Luring
3	UPT SDN 030280 SIDIKALANG	2	Sidikalang	Luring
4	UPT SDN 030281 SIDIKALANG	1	Batang Beruh	Luring
5	UPT SDN 030284 SIDIKALANG	1	Sidikalang Kalang Simbara Bintang Mersada	Luring
6	UPT SDN 030285 SIDIKALANG	2	Kuta Gambir Huta Rakyat Karing	Luring
7	UPT SDN 030286 PARSAORAN	1	Bintang Bintang Mersada	Luring
8	UPT SDN 030287 BATANG BERUH	1	Batang Beruh	Luring
9	UPT SDN 030288 BATANG BERUH	1	Batang Beruh	Luring
10	UPT SDN 030300 PANSURAN	1	Bintang Hulu Kalang Simbara	Luring
11	UPT SDN 030301 HUTA RAJA	1	Huta Rakyat	Luring
12	UPT SDN 030306 BARISAN NAULI	1	Batang Beruh	Luring
13	UPT SDN 033911 BELANG MALUM	1	Belang Malum	Luring
14	UPT SDN 033912 HUTA GAMBIR	2	Kuta Gambir Huta Rakyat Karing	Luring
15	UPT SDN 033913 KALANG BARU	2	Kalang Lae Nuaha	Luring
16	UPT SDN 033914 BINTANG	1	Bintang Mersada	Luring
17	UPT SDN 034779 SIDIANGKAT	2	Sidiangkat	Luring
18	UPT SDN 034781 BATANG BERUH	2	Batang Beruh	Luring
19	UPT SDN 034782 TRIKORA	2	Huta Rakyat Kalang Sidikalang	Luring
20	UPT SDN 035935 PANCURAN	1	Bintang Hulu	Luring
21	UPT SDN 037145 LAE PINANG	1	Bintang	Luring
22	UPT SD INPRES KALANG SIMBARA	1	Kalang Simbara	Luring
23	UPT SDN 030331 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III	Luring
24	UPT SDN 030332 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
25	UPT SDN 030333 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III	Luring
26	UPT SDN 030334 TELADAN SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III	Luring
27	UPT SDN 030335 BATANGARI	2	Pegagan Julu IX	Luring
28	UPT SDN 030336 BATANGARI	1	Pegagan Julu X	Luring
29	UPT SDN 030337 BATANGARI	1	Pegagan Julu VIII	Luring
30	UPT SDN 030339 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin Tanjung Beringin I	Luring
31	UPT SDN 030340 TANJUNG BERINGIN	2	Tanjung Beringin Tanjung Beringin I	Luring
32	UPT SDN 030345 HUTA GUGUNG	1	Kuta Gugung	Luring
33	UPT SDN 030346 HUTA GUGUNG	2	Pegagan Julu V	Luring
34	UPT SDN 030347 BANGUN JUMALA	1	Pegagan Julu II	Luring
35	UPT SDN 030348 LAE TANGGIANG	1	Pegagan Julu VI	Luring
36	UPT SDN 030349 PARBUAHAN	1	Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII	Luring
37	UPT SDN 030350 HUTA MANIK	1	Pegagan Julu VI	Luring
38	UPT SDN 030351 HUTA MANIK	1	Pegagan Julu VII	Luring
39	UPT SDN 030352 SIPALIPALI	1	Pegagan Julu VII	Luring
40	UPT SDN 030353 SILEUH-LEUH	1	Sileuh-leuh Parsaoran Pegagan Julu V	Luring
41	UPT SDN 030354 BULUH UJUNG	1	Buluh Ujung Pegagan Julu IV	Luring
42	UPT SDN 030355 PARRATUSAN	1	Pegagan Julu III	Luring
43	UPT SDN 030356 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin Pegagan Julu IV	Luring
44	UPT SDN 033923 SUMBUL	1	Pegagan Julu I	Luring
45	UPT SDN 033924 INVALIDEN	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II	Luring
46	UPT SDN 034794 LAE RIAS	1	Perjuangan Pargambiran	Luring
47	UPT SDN 034795 TUMPAK DEBATA	1	Pegagan Julu IV	Luring
48	UPT SDN 034797 PARSAORAN	1	Pegagan Julu VII Simartugan	Luring
49	UPT SDN 034798 PANGGURUAN	1	Pangguruan	Luring
50	UPT SDN 034799 DOLOK TOLONG	2	Dolok Tolong	Luring
51	UPT SDN 034800 BATANGARI	1	Pegagan Julu IX	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
52	UPT SDN 035936 PARGAMBIRAN	2	Pargambiran Pegagan Julu IV	Luring
53	UPT SDN 035937 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin I	Luring
54	UPT SDN 036562 PONJIAN	1	Pegagan Julu X	Luring
55	UPT SDN 037147 POLTAK BINTANG	1	Sileuh-Leuh Parsaoran Pangguruan	Luring
56	UPT SDN 037148 SONGSANG	1	Pegagan Julu VII	Luring
57	UPT SDN 037991 LANCANG	1	Pegagan Julu III Dolok Tolong	Luring
58	UPT SDN 037992 LAE PINAGAR	1	Perjuangan	Luring
59	UPT SD NEGERI BARISAN NAULI	1	Barisan Nauli	Luring
60	UPT SDN 030307 TIGALINGGA	1	Lau Sireme Gunung Tua	Luring
61	UPT SDN 030308 TIGALINGGA	1	Tigalingga Gunung Tua Lau Sireme Lau Bagot Sarintonu	Luring
62	UPT SDN 030310 TIGALINGGA	1	Lau Bagot Sarintonu Palding Lau Sireme Gununng Tua	Luring
63	UPT SDN 030312 LAU MIL	1	Laumil Batu Gungun	Luring
64	UPT SDN 030315 LAU MOLGAP	1	Lau Molgap	Luring
65	UPT SDN 030316 SUKANDEBI	2	Sukandebi	Luring
66	UPT SDN 030317 GUNUNG SAYANG	1	Palding Jaya Sumbul Palding	Luring
67	UPT SDN 030318 BERTUNGEN	1	Bertungen Julu Palding	Luring
68	UPT SDN 030319 SUMBUL KARO	1	Palding Jaya Sumbul Sumbul Tengah	Luring
69	UPT SDN 030320 LAU PANGGUH	1	Jumagerat Ujung Teran Sarintonu	Luring
70	UPT SDN 030321 SIBENGKURUNG	1	Jumagerat	Luring
71	UPT SDN 030322 UJUNG TERAN	1	Ujung Teran	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
72	UPT SDN 033917 BARISAN TIGOR	1	Lau Bagot Tigalingga Gunung Tua Lau Sireme Palding	Luring
73	UPT SDN 033918 RAMBAH SERIT	1	Lau Sireme	Luring
74	UPT SDN 034786 LAU PAKPAK	1	Lau Pakpak	Luring
75	UPT SDN 034787 UJUNG PARIRA	1	Sumbul Tengah Bukit Baru	Luring
76	UPT SDN 034789 MATANARI	1	Ujung Teran	Luring
77	UPT SDN 034790 SARINTONU	1	Sarintonu	Luring
78	UPT SDN 034791 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin	Luring
79	UPT SDN 037156 LAU MIL	1	Laumil Batu Gun Gun	Luring
80	UPT SDN 037995 LAU PAMULUTAN	1	Lau Molgap Soban	Luring
81	UPT SDN 037996 TORNAULI	1	Jumagerat Ujung Teran	Luring
82	UPT SDN 030439 LAU MECIHO	1	Harapan Gunung Tua	Luring
83	UPT SD INPRES KUTAMBARU	1	Harapan	Luring
84	UPT SDN 030441 PAMAH	1	Pamah	Luring
85	UPT SDN 030442 PAMAH	1	Pamah	Luring
86	UPT SDN 034820 LAU PETUNDAL	1	Pamah	Luring
87	UPT SDN 030438 TANAH PINEM	1	Lau Tawar	Luring
88	UPT SDN 033921 SIMBETEK	1	Tanah Pinem	Luring
89	UPT SDN 034818 BUTAR	1	Balandua	Luring
90	UPT SDN 030437 KUTABULUH	1	Kuta Buluh	Luring
91	UPT SDN 034823 KUTABULUH	1	Kuta Buluh	Luring
92	UPT SDN 034819 LIREN	1	Kuta Gamber	Luring
93	UPT SDN 034821 PASIR TENGAH	1	Pasir tengah	Luring
94	UPT SDN 038096 PASIR MBELANG	1	Pasir Mbelang	Luring
95	UPT SDN 034822 TAMBANG TIMAH	1	Lau Primbon	Luring
96	UPT SDN 035938 RENUN	2	Renun Alur Subur	Luring
97	UPT SDN 035940 MANGAN MOLIH	1	Mangan Molih	Luring
98	UPT SD INPRES LIANG JERING	1	Liang Jering	Luring
99	UPT SDN 037999 JUMA BATU	2	Suka Dame	Luring
100	UPT SDN 030440 LAU PERIMBON	1	Lau Perimbon	Luring
101	UPT SDN 035939 KEMPAWA	1	Kempawa	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
102	UPT SDN 037158 LAU NJUHAR	1	Lau Njuhar I	Luring
103	UPT SDN 037729 SINAR PAGI	1	Sinar Pagi	Luring
104	UPT SDN 030357 ADIAN NANGKA	1	Adiangupa Adiannangka	Luring
105	UPT SDN 030358 KERAJAAN	1	Juma Siulok	Luring
106	UPT SDN 030359 ADIAN NANGKA	1	Adiannangka	Luring
107	UPT SDN 030361 GOMIT	1	Gomit	Luring
108	UPT SDN 030363 SIHORBO	1	Sihorbo	Luring
109	UPT SDN 030364 BATU DONGKOL	1	Sinampang	Luring
110	UPT SDN 030372 SOBAN	1	Soban	Luring
111	UPT SDN 030373 GUNUNG GAJAH	1	Jumantuang	Luring
112	UPT SDN 030374 JUMANTUANG	1	Jumantuang	Luring
113	UPT SDN 030384 KANOPAN	3	Sosor Lontung	Luring
114	UPT SDN 030385 ANTUANG	1	Hutaimbaru	Luring
115	UPT SDN 030387 BUNTU RAJA	1	Adian gupa Jumasiulok Bunturaja	Luring
116	UPT SDN 033925 SINAMPANG	1	Sinampang	Luring
117	UPT SDN 033926 SOBAN	1	Soban	Luring
118	UPT SDN 034807 JUMATEGUH	2	Jumateguh	Luring
119	UPT SDN 035942 GOMIT	1	Jumateguh Gomit	Luring
120	UPT SDN 036565 LUMBAN SINAMBELA	1	Sosor lontung Pangaribuan	Luring
121	UPT SDN 037153 TORNAULI	1	Maju	Luring
122	UPT SDN 037154 SOBAN	1	Soban Pandan	Luring
123	UPT SDN 038094 ADIAN PARA-PARA	1	Adiangupa	Luring
124	UPT SDN 030388 PARONGIL	1	Parongil	Luring
125	UPT SDN 030391 PARONGIL	1	Urukblin Bakal Gajah	Luring
126	UPT SDN 030392 PARONGIL	1	Tungtung Batu Lokkotan	Luring
127	UPT SDN 030394 BONIAN	1	Bonian	Luring
128	UPT SDN 030395 GUMUNTUR	1	Sumbari	Luring
129	UPT SDN 030396 GUMUNTUR	1	Lae Panginuman	Luring
130	UPT SDN 030397 LAE SULPI	1	Lae Ambat Lae Pangaroan	Luring
131	UPT SDN 030398 LAE RAMBONG	1	Lae Rambong	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
132	UPT SDN 030399 PALIPI	1	Palipi Lumban Toruan	Luring
133	UPT SDN 033929 HUTA GINJANG	1	Polling Anak Anak Lumban Toruan	Luring
134	UPT SDN 033930 PARONGIL	2	Parongil	Luring
135	UPT SDN 034808 BAKAL GAJAH	1	Bakal Gajah	Luring
136	UPT SDN 034809 LOKKOTAN	2	Lokkotan	Luring
137	UPT SDN 034810 SIBORAS	1	Siboras Urukblin	Luring
138	UPT SDN 034812 SIRATA	1	Siratah	Luring
139	UPT SDN 035947 LAE AMBAT	1	Lae Ambat Lae Rambong	Luring
140	UPT SDN 037155 BONGKARAS	1	Bongkaras	Luring
141	UPT SDN 038097 LAE PANGAROAN	1	Lae Pangaroan	Luring
142	UPT SDN 030291 BANGUN	1	Bangun I Sitinjo I	Luring
143	UPT SDN 030292 LAE HOLE	2	Lae Hole Bangun	Luring
144	UPT SDN 030293 LAE HOLE	1	Sitinjo Lae Hole II	Luring
145	UPT SDN 030294 SIGALINGGING	2	Parbuluan IV	Luring
146	UPT SDN 030295 SITOHANG	1	Parbuluan IV	Luring
147	UPT SDN 030296 PARBAKALAN	1	Parbuluan III	Luring
148	UPT SDN 030297 PARBULUAN	1	Parbuluan I Parbuluan II	Luring
149	UPT SDN 030298 SIMALLOPUK	2	Parbuluan I	Luring
150	UPT SDN 030299 PARBULUAN-SIHOTANG	1	Parbuluan VI	Luring
151	UPT SDN 033916 SIARUNGARUNG	1	Lae Hole I Lae Hole	Luring
152	UPT SDN 034780 PANGIRINGAN	2	Parbuluan V Parbuluan III	Luring
153	UPT SDN 034783 BANGUN	2	Bangun Bangun I	Luring
154	UPT SDN 036561 SIGALINGGING	2	Parbuluan IV	Luring
155	UPT SDN 037146 LAE HOLE	1	Lae Hole	Luring
156	UPT SDN 037990 SIBIRA	1	Parbuluan VI	Luring
157	SDN LUMBAN JULU	1	Parbuluan II	Luring
158	SDN BARISAN NAINGGOLAN	1	Parbuluan III	Luring
159	UPT SDN 030376 BAKAL JULU	1	Bakal Julu	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
160	UPT SDN 030377 BAKAL JULU	1	Sipoltong	Luring
161	UPT SDN 030378 TUALANG	1	Tualang	Luring
162	UPT SDN 030379 BAKAL JULU	1	Bakal Julu Pangaribuan	Luring
163	UPT SDN 030380 PANDAN	1	Pandan	Luring
164	UPT SDN 030381 SILUMBOYAH	2	Silumboyah	Luring
165	UPT SDN 030383 PANGKIRISAN	1	Kuta Tengah	Luring
166	UPT SDN 030386 SUNGAIRAYA	2	Sungai Raya Lae Nuaha Kuta Tengah	Luring
167	UPT SDN 033927 LAE MEANG	1	Lae Nuaha	Luring
168	UPT SDN 034803 TAMBAHAN	1	Tambahan	Luring
169	UPT SDN 034804 PANGARIBUAN	1	Pangaribuan Sipoltong	Luring
170	UPT SDN 035941 GUNUNG MERIAH	1	Gunung Meriah	Luring
171	UPT SDN 036410 KM.11	1	Silumboyah	Luring
172	UPT SDN 036564 KUTADELLENG	1	Sungai Raya Tambahan Gunung Meriah	Luring
173	UPT SDN 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	1	Sigambir-gambir Sungai Raya	Luring
174	UPT SDN 037994 JUMA BORNO	1	Sungai Raya	Luring
175	UPT SDN 030365 LAE LONGKI	1	Janji	Luring
176	UPT SDN 030366 Pardamean	1	Janji Simungun Lae Sering	Luring
177	UPT SDN 030367 SIMUNGUN	1	Simungun	Luring
178	UPT SDN 030368 JAMBUR INDONESIA	1	Jambur Indonesia	Luring
179	UPT SDN 030369 PARDOMUAN	1	Pardomuan	Luring
180	UPT SDN 030370 LAE LUHUNG	1	Lae Luhung Lae Itam	Luring
181	UPT SDN 030371 LAE LOGAN	1	Lae Luhung Lae Haporas	Luring
182	UPT SDN 034801 LAE ITAM	1	Lae Itam Lae Rambong	Luring
183	UPT SDN 034802 LAE MARKELANG	2	Lae Markelang Lae Haporas	Luring
184	UPT SDN 034805 SOPOBUTAR	1	Sopobutar	Luring
185	UPT SDN 034806 LAE SERING	1	Lae Sering	Luring
186	UPT SDN 037152 KUTA KARANGAN	1	Janji	Luring
187	UPT SDN 038095 BARISAN SIRAIT	1	Pardomuan	Luring
188	UPT SD INPRES AEK NAULI	1	Lae Markelang Lae Sering	Luring
189	UPT SDINPRES LAE KABERUN	1	Lae Itam	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
190	UPT SDN 030323 BUKIT TINGGI	2	Bukit Tinggi Mbinanga	Luring
191	UPT SDN 030324 TANJUNG SALUKSUK	1	Perrik Mbue Tanjung Saluksuk	Luring
192	UPT SDN 030325 SIMANDUMA	1	Simanduma	Luring
193	UPT SDN 030326 TIGALAMA	1	Onan lama	Luring
194	UPT SDN 030327 LAKSA	1	Laksa	Luring
195	UPT SDN 030328 BANDAR HUTAUSANG	1	Bandar Hutausang	Luring
196	UPT SDN 030329 KEBUN SIBABI	2	Lingga Raja II Kuta Usang	Luring
197	UPT SDN 030330 PISPIS	1	Bandarhutausang	Luring
198	UPT SDN 034788 SALUKSUK	1	Tanjung Saluksuk	Luring
199	UPT SDN 034792 SIMARTUGAN JEHE	1	Onan lama	Luring
200	UPT SDN 034793 JUMAMBALNO	1	Simartugan	Luring
201	UPT SDN 035950 SILENCER	1	Simartugan	Luring
202	UPT SDN 036571 PARSIROAN	1	Bukit Baru Bukit Tinggi	Luring
203	UPT SDN 036572 LINGGA RAJA	1	Lingga Raja Simartugan	Luring
204	UPT SD INPRES KUTA USANG	1	Kuta usang	Luring
205	UPT SDN LINGGA TENGAH	1	Lingga Raja II	Luring
206	UPT SD NEGERI SUKAMARI	1	Linggaraja	Luring
207	UPT SDN 030400 SEMPUNG	1	Lumban Sihite	Luring
108	UPT SDN 030403 PANDIANGAN	1	Pandiangan	Luring
209	UPT SDN 030404 BULUDURI	2	Buluduri	Luring
210	UPT SDN 030405 BULUDURI	2	Sempung Polling	Luring
211	UPT SDN 030407 LAEPARIRA	1	Lae Parira	Luring
212	UPT SDN 030408 KENTARA	2	Kentara	Luring
213	UPT SDN 030409 SUMBUL	1	Sumbul	Luring
214	UPT SDN 030410 KABANJULU	2	Kaban Julu	Luring
215	UPT SDN 033928 SIDUMPE	1	Sempung Polling	Luring
216	UPT SDN 034811 BULUDURI	1	Buluduri	Luring
217	UPT SDN 035948 GULANGAN	1	Pandiangan	Luring
218	UPT SDN 036409 LUMBANTORUAN	1	Lumban Toruan	Luring
219	UPT SDN 036569 HUTALOBU	1	Kentara	Luring
220	UPT SDN 030313 GUNUNG SITEMBER	1	Gunung Sitember	Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
221	UPT SDN 030314 BUKIT KARO	2	Bukit Lau Kersik Batu Gun Gun	Luring
222	UPT SDN 033920 RANTEBESI	2	Tupak Raja Rante Besi	Luring
223	UPT SDN 034785 BATUGUNGUN	1	Tupak Raja Batu Gun Gun	Luring
224	UPT SDN 035949 GUNDALING	1	Gundaling	Luring
225	UPT SDN 035951 BULUH MENGKAL	1	Rante Besi Lau Lebah	Luring
226	UPT SDN 037157 KENDET LIANG	1	Kendet Liang	Luring
227	UPT SDN LAU PENGKERUKEN	1	Gundaling	Luring
228	SDN LAU LEBAH	1	Lau Lebah	Luring
229	UPT SDN 030302 KARING	1	Karing	Luring
230	UPT SDN 030303 BERAMPU	1	Berampu Karing Sumbul	Luring
231	UPT SDN 030304 SUMBUL BERAMPU	1	Berampu Karing Sumbul	Luring
232	UPT SDN 030305 SAMBALIANG	1	Sambaliang	Luring
233	UPT SDN 033915 PASI	1	Pasi	Luring
234	UPT SDN 034778 KARING	1	Karing	Luring
235	UPT SD INPRES BANJAR TOBA	1	Banjar Toba Karing	Luring
236	UPT SDN 030341 SILALAHI	1	Silalahi III	Luring
237	UPT SDN 034796 SILALAHI	1	Salalahi I	Luring
238	UPT SDN 030342 SILALAHI	1	Silalahi II	Luring
239	UPT SDN 030344 PAROPO	1	Paropo I Paropo	Luring
240	UPT SDN 033922 PAROPO	1	Paropo I	Luring
241	UPT SDN 030343 BINANGARA	1	Silalahi II	Luring
242	UPT SDN 030289 PANJI	3	Sitinjo II Sitinjo	Luring
243	UPT SDN 030290 PUNGUAN NAULI	3	Sitinjo Sitinjo I Sitinjo II	Luring
244	UPT SDN 034784 PANJI DABUTAR	2	Panji Dabutar	Luring

II. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
1	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	10	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Bintang Hulu Hutaimbaru Bintang Kalang Simbara Kalang Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada	Daring
2	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	9	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Bintang Hulu Hutaimbaru Bintang Kalang Simbara Kalang Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada	Daring
3	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	8	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Panji Dabutar Hutaimbaru Bintang Hulu Bintang Kalang Simbara Kalang Baru Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada Sitinjo II	Daring
4	SMP NEGERI 1 SITINJO	6	Sitinjo Sitinjo I Sitinjo II Panji Dabutar Parbuluan Bintang Hulu	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
5	SMP NEGERI 1 SUMBUL	8	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III Pangguruan Hutagugung Pegagan Julu V Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII Pegagan Julu VIII	Daring
6	SMP NEGERI 2 SUMBUL	5	Tanjungberingin Tanjungberingin 1 Doloktolong Pegagan Julu VII Pegagan Julu VI Perjuangan Pargambiran Barisan Nauli Pegagan Julu II Pegagan Julu I Pegagan Julu IV	Daring
7	SMP NEGERI 3 SUMBUL	6	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III Pegagan Julu IV Pegagan Julu V Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII Dolok Tolong	Daring
8	SMP NEGERI 4 SUMBUL	4	Pegagan Julu VII Pegagan Julu VIII Pegagan Julu IX Pegagan Julu X	Daring
9	SMP NEGERI 5 SUMBUL	3	Sileuleuh Parsaoran Pargambiran Pegagan Julu V Parbuluan VI Barisan Nauli Perjuangan	Daring
10	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	3	Silalahi I Silalahi II Silalahi III Paropo Paropo I	Daring
11	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	7	Bangun Bangun I Sitinjo I Lae Hole Lae Hole I Lae Hole II Parbuluan IV	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
12	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	6	Parbuluan II Parbuluan III Parbuluan IV Parbuluan V Parbuluan VI	Daring
13	SMP NEGERI 3 PARBULUAN	3	Parbuluan I Parbuluan II Hariara Pintu	Daring
14	SMP NEGERI 1 BERAMPU	6	Karing Pasi Banjar Toba Sambaliang Hutaimbaru Sumbul Hutarakyat Berampu	Daring
15	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	7	Lae Parira Buluduri Kentara Huta Lobu Juma Teguh Sumbul Sidumpe	Daring
16	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA	7	Parongil Polling Anak-anak Longkotan Bonian Tungtung Batu Bongkaras Siboras Sirata Urukblin Palipi Lumbantoruan	Daring
17	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGA-PUNGGA	4	Lae Ambat Lae Pangaroan Lae Panginuman Sumbari Bakal Gajah	Daring
18	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	5	Jumateguh Jumantuang Gunung Gajah Gomit Juma Padi Soban Napanbelang Telaga Tellu Adiannangka	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
19	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU	4	Sosorlotung Huta Tengah Kabanjulu Juma Teguh Hutaimbaru Huta Padang Jumantuang	Daring
20	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU	4	Adiannangka Sihorbo Sinampang Maju	Daring
21	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR	4	Janji Simungun Jambur Indonesia Lae Sering Lae Markelang Bakal Gajah Urukblin	Daring
22	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HILIR	3	Sopobutar Jambur Indonesia	Daring
23	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	5	Pardomuan Lae Luhung Lae Itam Lae Haporas Laerambong Sinar Pagi Lae Markelang	Daring
24	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	4	Gunung Sitember Batu Gun-Gun Tupak raja Rante Besi Gundaling Kendetliang Lau Kersik Bukit Karo	Daring
25	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	9	Lau Bagot Tigalingga Lau Sireme Sukandebi Laumil Bertungen Julu Harapan Palding Palding Jaya Sumbul Sumbul Tengah Sarintonu Juma Gerat Gunung Tua Ujung Teran	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	6	Lau Sireme Tigalingga Laumil Batu Gun-Gun Harapan Juma Gerat Bukit Karo	Daring
27	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	4	Lau Pakpak Lau Pamulutan Lau Rambong I, II, III Lau Ipuh Paranginan Barisan Gereja Tampok Kite Barisan Sempung Bukit Karo Lau Kersik Sukandebi Napanbelang	Daring
28	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	5	Kuta Buluh Pamah Balan Dua Kuta Gamber Lau Gunung Kempawa Lau Perimbon Suka Dame Pasir Mbelang	Daring
29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	4	Tanah Pinem Tanah Lau Tawar Rante Besi Pamah Harapan Buluh Mengkal Lau Sungsang Lau Lebah	Daring
30	SMP NEGERI 3 TANAH PINEM	2	Pasir Tengah Pasir Mbelang Mangan Molih	Daring
31	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	2	Lau Njuhar Liang Jering Alur Subur Pasir Mbelang	Daring
32	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	6	Bandar Huta Usang Simartugan Lingga Raja Onan Lama Kuta Usang Simanduma Pegagan Julu VII Laksa	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
33	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	2	Lingga Raja II Kuta Usang	Daring
34	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	3	Tanjung Saluksuk Perik Mbue Onan Lama Bukit Tinggi Bukit Baru Mbinanga Sumbul Tengah	Daring
35	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HULU	6	Bakal Julu Sipoltong Pangaribuan Silumboyah Sigambir-gambir Gunung Meriah Sumbul Karo	Daring
36	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HULU	5	Tambahan Kuta Tengah Lae Nuaha Sungairaya Gunung Meriah Sosor Lontung	Daring
37	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HULU	2	Jumantuang Gomit Bertungen Gunung Gajah	Daring

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH., MH.
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

I. PERHITUNGAN PEMBOBOTAN PENDAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Jalur Zonasi

Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari desa/kelurahan zonasi melebihi daya tampung maka dilakukan pembobotan jarak rumah berdasarkan titik koordinat kartu keluarga orang tua/wali pendaftar dengan sekolah yang dituju sesuai tabel berikut:

No	JARAK (meter)		BOBOT
1	0	200	500
2	201	400	495
3	401	600	490
4	601	800	485
5	801	1.000	480
6	1.001	1.200	475
7	1.201	1.400	470
8	1.401	1.600	465
9	1.601	1.800	460
10	1.801	2.000	455
11	2.001	2.200	450
12	2.201	2.400	445
13	2.401	2.600	440
14	2.601	2.800	435
15	2.801	3.000	430
16	3.001	3.200	425
17	3.201	3.400	420
18	3.401	3.600	415
19	3.601	3.800	410
20	3.801	4.000	405
21	4.001	4.200	400
22	4.201	4.400	395
23	4.401	4.600	390
24	4.601	4.800	385
25	4.801	5.000	380
26	5.001	5.200	375
27	5.201	5.400	370
28	5.401	5.600	365
29	5.601	5.800	360
30	5.801	6.000	355
31	6.001	6.200	350
32	6.201	6.400	345

No	JARAK (meter)		BOBOT
33	6.401	6.600	340
34	6.601	6.800	335
35	6.801	7.000	330
36	7.001	7.200	325
37	7.201	7.400	320
38	7.401	7.600	315
39	7.601	7.800	310
40	7.801	8.000	305
41	8.001	8.200	300
42	8.201	8.400	295
43	8.401	8.600	290
44	8.601	8.800	285
45	8.801	9.000	280
46	9.001	9.200	275
47	9.201	9.400	270
48	9.401	9.600	265
49	9.601	9.800	260
50	9.801	10.000	255
51	>10.000		250

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
   Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3. Jalur Afirmasi
   Apabila pendaftar calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. Jalur Prestasi
   Jalur prestasi hanya dibuka jika pendaftar yang dinyatakan diterima dari jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi kurang dari daya tampung.
   Pembobotan adalah sesuai tabel berikut:

No	JENIS PRESTASI	BOBOT
1	Akademis: a. peringkat I KSN tingkat Kabupaten/Provinsi; b. peringkat II KSN tingkat Kabupaten/Provinsi; c. peringkat III KSN tingkat Kabupaten/Provinsi; d. rata-rata nilai kelulusan 95,00 – 100,00; e. rata-rata nilai kelulusan 90,00 – 94,99; dan f. rata-rata nilai kelulusan 85,01 – 90,00.	 500 475 450 500 475 450
2	Non Akademis: a. peringkat I lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi; b. peringkat II lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi; dan c. peringkat III lomba non akademis tingkat Kabupaten/Provinsi.	 500 475 450

II. PEMERINGKATAN PENDAFTAR SEKOLAH DASAR (SD)

Apabila pendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi melebihi kuota atau daya tampung maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan usia. Pendaftar yang ber usia lebih tinggi menjadi prioritas diterima dan jika masih sama maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH., MH.
NIP. 19731208 200502 1 003